

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI

Jln. Tengah, Desa Toto Selatan, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, telp. (0435)-8591278, fax (0435) 8591277, e-mail : hiwas.gto@gmail.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) GORONTALO TAHUN 2021

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing selaku Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo terdiri dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo Provinsi Gorontalo), unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Gorontalo, Unsur Perguruan Tinggi/Pakar dan unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan telah dinyatakan quorum (daftar hadir terlampir) melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo, bersepakat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. **UNSUR APINDO** merujuk, mengikuti dan melaksanakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang memerintahkan kepada Gubernur seluruh Indonesia untuk :
 - a. melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan tahun 2020
 - b. melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan
 - c. menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi Gorontalo Tahun 2021 pada tanggal 31 oktober 2020 pada angka Rp. **2.788.826. (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah)**
4. **UNSUR SERIKAT PEKERJA :**
 - a. Menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020
 - b. Merumuskan formulasi Penetapan UMP Tahun 2021 Sesuai Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 43 dan Pasal 44
 - c. Adapun Formulasi Dasar Perhitungan, angka Inflasi nasional 1,42 % ditambah dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional 1,91 %, menjadi 3,33 %. Sehingga UMP Tahun 2021 Naik sebesar Rp. **92.868** (Sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

- d. Berdasarkan hasil formulasi di atas maka usulan UMP Tahun 2021 senilai Rp. **2.881.694 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)**

5. UNSUR AKADEMISI

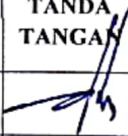
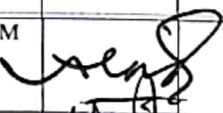


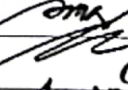
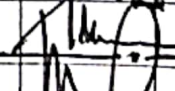

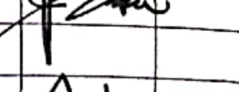



Pandangan secara ekonomi, melihat kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo maka tidak ada kenaikan upah minimum sudah realistis. Namun ada kenaikan ataupun tidak, pemerintah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

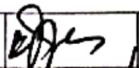
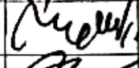

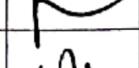
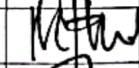

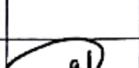


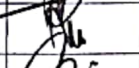
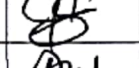
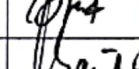
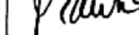
- a. Memastikan jaminan sosial kepada pekerja ditingkatkan dan tepat sasaran
- b. Fokus pada perlakuan terhadap penerima upah diluar UMP dalam hal struktur dan skala upah
- c. Melakukan evaluasi penerapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo secara periodik

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dalam Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 31 Oktober 2020

Peserta Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo

NO	NAMA	JABATAN/ UTUSAN	TANDA TANGAN	KET
1:	BAMBANG TRIHANDOKO, SP. M.Si	Ketua Dewan Pengupahan Prov. Gorontalo		
2.	FUNCO TANIPU, SH., MA	Wakil Ketua/ Unsur Perguruan Tinggi		
3	AMIR HAMZAH HADJU, S.Sos	Sekretaris/ Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo		
4	YULIN LIMONU, SH., MH	Biro Hukum		
5	Ir. SUTIRIN, M.Si	BPS Provinsi Gorontalo		
6	SAFRANO ISA, SP., M.Si	Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi		
7	Dr. Hi. JISMON DJAKARIA, S.TP, M.Si	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo		
8	MAX S. MOERAD, SE., MM	BAPPEDA Provinsi Gorontalo		
9	Drs. MUSANIF NIODE, Mec. Dev	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo		
10	IWAN AHMAD SONDAKH, SH., MH	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo		
11	RAFLIN HINELO, S.Pd., M.Si	Unsur Perguruan Tinggi (UNG)		
12	Dr. LUSIANA MARGARETH TIJOW, SH., MH	Unsur Perguruan Tinggi (UNG)		
13	ALBERT PEDE, SH., MH	APINDO Provinsi Gorontalo		
14	Dr. ZUHRI ABDUSSAMAD, SE., M.Si	APINDO Provinsi Gorontalo		

15	ABD. RAHMAN K. MA'RUF, S.Kom., M.Pd	APINDO Provinsi Gorontalo	
16	ABD. RAHIM UMAR, SE	APINDO Provinsi Gorontalo	
17	MOH. HARUN SYAHRUL, SH	APINDO Provinsi Gorontalo	
18	DARWIN PAUTINA, S.I.Kom	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	
19	SAFRIN SAIFI, SE	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	
20	MEYSKE ABDULLAH, S.Sos, SH	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	
21	AHMAD ANDRIKA HASAN, S.Sos	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	
22	MOH. ZULKARNAIN DAIPAHA, SE., SH	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	
23	MASTINA DJAKANI, SH	Sekretariat Dewan Pengupahan	
24	GUDWER ISMAIL NASARU, SH	Sekretariat Dewan Pengupahan	
25	MOH. YODI PANTO BILUDI, SH	Sekretariat Dewan Pengupahan	
26	RITA HULOPI, SH	Sekretariat Dewan Pengupahan	
27	HERRY KALUKU, ST	Sekretariat Dewan Pengupahan	
28	YUSLINA PANU	Sekretariat Dewan Pengupahan	
29	SANTI CHRISNYOWATI, S.Sos	Sekretariat Dewan Pengupahan	